

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes) DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN
DI DESA LAMPO KECAMATAN BANAWA TENGAH
KABUPATEN DONGGALA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas
Ushuluddin Adab Dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri (UIN)
Datokarama Palu*

Oleh :

AKMAL
NIM. 17.4.14.0009

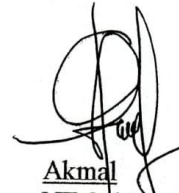
**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka gelar dan skripsi yang diperoleh batal demi hukum.

Palu, 22 Juni 2022

Penyusun,





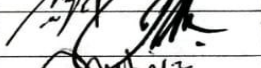


Akmal

NIM: 17.414.0009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi saudara Akmal, NIM. 17.4.14.0009 dengan judul “**Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala**” yang telah di ajukan dihadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Pada tanggal 09 Agustus 2022 M. yang bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si.	
Munaqisy I	Samsinas, S.Ag., M.Ag.	
Munaqisy II	Drs. Ulmuddin, M.S.I	
Pembimbing I	Drs. H. Iskandar. M.Sos.i	
Pembimbing II	Andi Muthia Sari Handayani. S.Psi.,M.Psi	

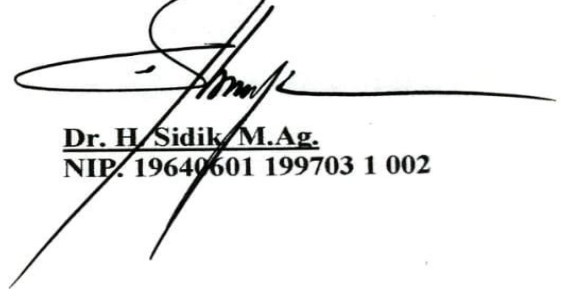
Mengatahui

**Ketua Jurusan Pengembangan
Masyarakt Islam**



Dr. Muhammad Alim Ihsan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19690605 2005011 011

**Dekan Fakultas Ushuluddin Adab
dan Dakwah**



Dr. H. Sidik, M.Ag.
NIP. 19640601 199703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ولإصلاحه ولإسلام علي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala”

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang turut membantu memberikan saran, masukan, semangat. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Anwar dan Ibunda tersayang Darmiati yang telah melahirkan, mengasahi dan membesarkan serta mendidik, memberikan dukungan, nasihat dan do'a yang tiada henti-hentinya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor beserta unsur pimpinan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. yang memberikan berbagai kebijakan kepada penulis selama perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag. selaku Dekan, Mokh. Ulil Hidayat. S.Ag., M.Fil.I Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Syamsuri, S.Ag., M.Ag Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Hj. Nurhayati, S.Ag., M.Fil.I Fakultas Ushuluddin, Adab, dan

Dakwah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang memberikan pengetahuan dan memfasilitasi kepada penulis selama perkuliahan.

4. Bapak Dr. Muhammad Alim Ihsan, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, dan Bapak Ahmad Haekal, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan motivasi dan saran yang membangun kepada penulis.
5. Bapak Drs, H. Iskandar. M.Sos.I selaku Pembimbing I dan Ibu Andi Muthia Sari Handayani, S.Psi.,M.Psi, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan semangat serta bimbingannya kepada penulis.
6. Ibu Supiani. S.Ag. selaku Kepala Perpustakaan Uin Datokarama Palu
7. Para dosen sebagai tenaga akademik Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam dan penanggung jawab akademik Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis.
8. Bapak Mashuri L Lakara selaku Kepala Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala yang telah memberikan semangat dan saran kepada penulis.
9. Bapak Sunardin selaku Ketua atau Direktur BUMDes Desa Lampo yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.
10. Ibu Wilda, S. Sos selaku Sekretaris Desa Lampo yang telah memberikan arahan, bimbingan serta saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Ilham selaku Sekretaris BUMDes Desa Lampo yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan di kampus tercinta UIN Datokarama Palu yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
13. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu dan Saudara atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, Aamiin.

Palu , 22 Juni 2022

Akmal

NIm. 17.4.14.0009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penegasan Istilah	8
E. Garis-Garis Besar Isi	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Pemberdayaan Masyarakat	14
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	14
2. Aspek Pemberdayaan Masyarakat	17
3. Faktor Pemberdayaan Masyarakat	19
C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	22
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	22
2. Landasan Hukum Bumdes	22
3. Pendirian BUMDes	24
4. Pengurus dan Pengelolaan BUMdes	24
5. Keuangan BUMDes	25
6. Tujuan BUMDes	26
7. Prinsip Umum Pengelolaan BUMDes	26
D. Kemiskinan	29
1. Pengertian Kemiskinan	29
2. Aspek Kemiskinan	32
3. Faktor Kemiskinan	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Kehadiran Penelitian	35
D. Data dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknis Analisis Data	39
G. Pengecekan Keabsahan Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Lampo.....	42
B. Gambaran Umum BUMDes Desa Lampo	45
C. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Lampo.	48
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan.	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran.	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

1. Observasi Sekretariat BUMDes di kantor Desa Lampo.....
2. Observasi Usaha Penyewaan kendaraan BUMDes Desa Lampo.....
3. Observasi Usaha Jasa Sewa Tenda.....
4. Pengambilan data di Kantor Desa.
5. Wawancara bersama Bapak Mashuri L Lakara kepala Desa Lampo.
6. Wawancara bersama Bapak Sunardin ketua BUMDes Desa Lampo.....
7. Wawancara bersama Ibu Devi Bendahara BUMDes Desa Lampo.....
8. Wawancara bersama Bapak Supriadi ketua kordinator unit usaha
BUMDes Desa Lampo.
9. Wawancara bersama Bapak Ilham selaku sekertaris BUMDes Desa
Lampo.....
10. Wawancara bersama Ibu Lita Masyarakat Desa Lampo.

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk di Lihat Dari Usia	42
2. Jumlah Penduduk di Lihat Berdasarkan pekerjaan	42
3. Struktur Pengurus Inti BUMDes Desa Lampo	44
4. Modal Usaha BUMDes Desa Lampo.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat Izin Penelitian
3. Jadwal Seminar Proposal Skripsi
4. Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Lembar Control Kehadiran Seminar Proposal Skripsi.....
6. Pedoman Wawancara
7. Daftar Informan.....
8. Dokumentasi Penelitian
9. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : AKMAL

NIM : 17.4.14.0009

**Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa
Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Lampo
Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala**

Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa Lampo dan berbadan hukum pemerintah, desa mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Berkenan dengan hal tersebut maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik desa dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala dan Faktor pendukung dan penghambat dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi selanjutnya dianalisis melalui tahap reduksi data, pemaparan data dan terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemberdayaan yang dilakukan oleh Bumdes dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Yaitu dengan memberikan bantuan berupa modal untuk para pelaku usaha, selain itu terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan adanya program usaha penjualan gas LPG dan jasa penyewaan mobil dan juga terbukanya lapangan pekerjaan seperti buruh pasang tenda terowongan, menjadi pengelola wisata desa, dan ada yang menjadi sopir mobil operasional BUMDes.

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan pemerintah Desa mampu membangun kerjasama dengan pemerintah daerah agar bisa menambah modal usaha BUMDes dalam rangka meningkatkan program-program usaha yang lebih besar dan bisa membantu pemerintah desa dalam peningkatan ekonomi di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah melahirkan suatu pendekatan baru yang diharapkan dapat memberikan rangsangan dan menggerakkan jalan perekonomian didesa melalui pendirian sebuah lembaga ekonomi yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam pengertiannya (BUMDes) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset dan sumber daya ekonomi desa yang bertujuan mengoptimalkan aset desa dan meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa.¹

Pembentukan BUMDes merupakan implementasi dari undang-undang yang memberikan kawenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.² UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 87 ayat 1, fungsi BUMdes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi SDA dan SDM. Fungsi lain dari BUMDes adalah sebagai lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa. Sebagai

¹Nikmah Sholihati, *“Peran dan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar”* Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bandah Aceh, 2020 M/ 1442 M.

²Edy yusuf agung gunanto dkk, *pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes)*, 13 no1 (2016). <http://sinta.kemendiikbud.go.id> (17 Oktober 2021)

lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, serta peningkatan lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan. Dengan kata lain, etinitas ini diharapkan menjadi lembaga yang membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran desa dan juga mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, selain itu mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.³

Peran lain yang harus dilakukan oleh BUMDes yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi.

Perlu adanya BUMDes untuk membantu masyarakat terlebih masyarakat miskin. BUMDes akan menjadi penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa sembako dan Bumdes juga akan melakukan pemberdayaan masyarakat miskin dengan memberikan pekerjaan dan memudahkan masyarakat dalam menjual hasil dari panen perkebunan masyarakat itu sendiri. Kedepan subsidi-subsidi pemerintah juga akan disalurkan lewat BUMDes. Sehingga secara tidak

³ Zufikar wijaya <https://lifepal.co.id/media/bumdes>.,(Di akses pada tanggal 8 Oktober 2021)

langsung setiap BUMDes nanti akan secara otomatis memiliki unit usaha pokok BUMDes yang sistemnya sama diseluruh Indonesia⁴

Idealnya BUMDes diharapkan mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa dan sebagai perusahaan desa. Namun faktanya dalam operasionalnya BUMDes terkendala oleh modal sehingga sulit mengembangkan diri. Melihat kondisi desa yang selama ini sangat minim anggaran maka sulit untuk merealisasikan produk-produk rencana desa sekaligus juga meningkatkan apatisme masyarakat.⁵ Tidak berjalannya BUMDes sesuai harapan berdampak pada pelayanan yang tidak memuaskan kepada masyarakat dalam bidang perekonomian dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Permasalahan lainnya adalah BUMDes tidak beroperasi sebagai mestinya, dikondisi ini disebabkan karena manajemen BUMDes tidak dikelola secara kompeten dan tidak sesuai dengan potensi unggulan desa, terdapat pula penyalahgunaan dana BUMDes yang memberikan efek negatif, seperti tidak berfungsinya BUMDes akibat kekurangan modal dan berpengaruh terhadap perkembangan BUMDes itu sendiri

Dalam kiprahnya, BUMDes memiliki segudang problematika. Pengelolaan. BUMDes bisa dikatakan sulit karena adanya masalah seperti keterbatasan sumber daya alam (SDM). pada proses pengelolaan BUMDES,

⁴ Dr. Zubaedi, M.ag., M. Pd, *Pengembangan masyarakat Wacana dan praktik* (PT Fajar Interpratama, kencana preadamedia group Jakarta 2013) . 90, <https://. Google Ebook>(di akses pada tanggal 25 Oktober 2021), 48.

⁵ Agung Septian Wijarnoko “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Padankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto*” (Skripsi 2012), 3 (skripsi, Progrman Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,

seringkali ditemui beberapa persoalan yang harus diselesaikan oleh pengelola atau pengurus BUMDes. Adapun beberapa persoalan yang dihadapi oleh BUMDes yaitu masalah pengelolaan organisasi sangat dibutuhkan untuk kelancaran suatu usaha. Pengelolaan organisasi akan mendorong kemajuan dan perkembangan usaha. Tidak sedikit BUMDes yang tidak bisa berkembang karena kurangnya pengaturan organisasi yang baik dalam BUMDes. Meskipun kepengurusan BUMDes sudah dibentuk namun pada implementasinya, kepengurusan BUMDes belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

Selain itu persoalan yang harus bisa diselesaikan oleh BUMDes yaitu harus mampu menemukan dan mengembangkan potensi desa. Masing-masing desa memiliki potensi yang bisa dikembangkan, entah itu potensi dalam sumber daya alam (wisata alam, pertanian) ataupun potensi dalam bidang sumber daya manusia (kerajinan, jasa). Tantangan untuk mengembangkan potensi bagi yang dimiliki oleh desa bisa dikatakan sulit, karena menyatukan masyarakat untuk mengembangkan potensi desa tidaklah mudah.

Demikian pula harapan dan persoalan BUMDes di desa Lampo, seperti minimnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran yang di berikan pemerintah kepada BUMDes, sehingga upaya dalam peningkatan ekonomi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan.⁶

⁶ Observasi penelitian 18 November 2021 di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala, 55.

BUMDes yang pengelolaannya sudah baik serta memiliki output yang berkualitas seringkali masih kesulitan dalam hal promosi. Hal tersebut tentunya membuat kepengurusan BUMDes harus benar-benar mampu melihat peluang dan pintar dalam mencari cara untuk melakukan promosi. Sebab akan menjadi percuma jika potensi desa yang sudah disulap menjadi produk namun tidak dapat terdistribusi dengan baik hanya karena masalah promosi yang kurang baik.

Pada intinya. Pengurus BUMDes tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat desa juga harus ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memberikan pengertian melalui program sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat desa sehingga ini menjadi kunci keberhasilan BUMDes.⁷

Untuk mencapai keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat. BUMDes harus melakukan pengelolaan yang baik dan berusaha membuat kegiatan yang berkaitan dengan peran masyarakat dalam peningkatan usaha, agar dana yang disalurkan oleh BUMDes dalam bentuk program pemberdayaan, menengah yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, dan juga pemerintah perlu memperhatikan berbagai fasilitas penunjang pengelolaan BUMDes demi kelancaran program yang dilaksanakan.⁸

Dengan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan pengelola BUMDes dalam melakukan berbagai macam program pemberdayaan, maka

⁷Blog Bumdes.id. (Di akses pada tanggal 19 Oktober 2021).

⁸Blonkod Harun, S.Pd, Herlina Rasjid, SE.,MM “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Pengelolaan BUMDES Di desa Gentuma kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.(Laporan penelitian akhir, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo).

BUMDes dapat berperan optimal dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha rakyat, misalnya pemberian akses yang mudah dalam transaksi jual beli hasil olahan dan lain sebagainya.

Harapan pada program BUMdes tersebut, tergambar baik di desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dari pengamatan lapangan yang dilakukan, diperoleh fakta bahwa masyarakat juga terlibat dalam pengelolaan program BUMdes.⁹

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis memiliki ketertarikan lebih lanjut dan melakukan penelitian didesa lampo kecamatan banawa tengah kabupaten donggala yang berjudul **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan pokok permasalahan adalah masalah kemiskinan, maka yang akan menjadi rumusan masalah adalah

1. Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala?

⁹ Observasi penelitian 18 November 2021 di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala, 48.

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam setiap penyusunan, sangat diperlukan tujuan dan manfaat penelitian agar pembahasan lebih terarah dan terfokus terhadap pokok pembahasan yang dikaji sesuai apa yang dihadapi.

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes

2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan pemikiran bagi semua pihak dan khususnya bagi pengurus BUMDes dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta dapat menambah literatur dan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya.

D. Penegasan Istilah

Sebelum melangkah lebih jauh perlu adanya penegasan istilah bertujuan agar skripsi ini lebih jelas dalam sebuah penjelasan dari istilah-istilah tersebut agar tidak terjadi perbedaan penafsiran atau kesalahan pemahaman terhadap makna dari judul. Adapun judul penelitian ini adalah:

“Pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala”. Maka penulis memberikan pengertian kata-kata yang terdapat pada judul tersebut sebagai berikut.

1. Pemberdayaan

Pemdagri RI No 7 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 8 tentang peraturan menteri dalam negeri tentang kader pemberdayaan masyarakat. Menyatakan

“pemberdayaan adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya atau mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”¹⁰

¹⁰ Peraturan Menteri dalam Negeri Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, (No 7 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 8), 2

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan usaha milik desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan masyarakat desa setempat, Permodalan Badan Usaha Milik Desa berasal dari pemerintah Desa. Tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD. Anggaran pendapatan dan belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana tahunan keuangan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.¹¹

3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang yang dibandingkan dengan standar kehidupan yang bersangkutan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya

¹¹ UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.

terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang terolong sebagai orang miskin.¹²

Dari hasil kutipan diatas ditunjukkan kemiskinan adalah tingkat hidup yang rendah, kekurangan materi pada sejumlah orang atau golongan dengan standar kehidupan yang tergolong sebagai orang miskin.

E. Garis-garis Besar isi

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang skripsi ini, penulis akan memaparkan materi-materi yang terkandung dalam masing-masing bab yang akan ditulis dalam skripsi ini:

Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan terakhir garis-garis besar isi.

Bab II yaitu kajian pustaka, membahas kajian-kajian teoritis yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Pemberdayaan Masyarakat, Faktor Pemberdayaan Masyarakat dan pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pengertian Kemiskinan.

Bab III yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan terakhir pengecekan keabsahan data.

¹² Reza Attabiurobbi Annur, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo kabupaten Kudus*, Jurnal (EDAJ 2 (4) 2013) .412

Bab IV penulis akan menguraikan tentang gambaran umum Desa Lampo, gambaran umum BUMDes Desa lampo, pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Lampo dan faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dalam mengurangi kemiskinan di Desa Lampo.

Bab V merupakan bab penutup dari isi skripsi, berisikan beberapa kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peninjauan terhadap penelitian terdahulu atau yang disebut dengan tinjauan pustaka ini dilakukan untuk meninjau sejauh mana masalah dalam penelitian ini pernah ditulis orang lain secara mendalam. Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah diuji kebenarannya berdasarkan metode yang digunakan pada penelitian tersebut. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan referensi untuk membandingkan penelitian yang sekarang dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian.

Sebelumnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Esi Intan Sari yang berjudul Peran badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengentaskan Kemiskinan dikecamatan Panti Kabupaten Jember, diketahui penelitian tersebut yaitu membahas masalah pendapatan masyarakat Desa sebelum Menggunakan BUMDes dalam Mengentaskan kemiskinan.¹

Mutiara melakukan penelitian tentang Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengurangi Kemiskinan di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Kabupaten Donggala. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya BUMDes dalam mengurangi kemiskinan belum sepenuhnya terlaksana dengan

¹ Esi Intan Sari, "Peran badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dikecamatan Panti Kabupaten Jember" Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Jember, 2019).

baik, di sebabkan karena dapat dilihat dari pendapatan dan perekonomian masyarakat yang masih bisa dikatakan rendah.²

Andriani Sari dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh BUMDes dalam pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Perbaungan yang dilihat dari adanya peningkatan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya BUMDes.³

Dari ketiga judul tersebut jelas memiliki perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adapun persamaan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang peningkatan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan Perbedaan Nampak dari judul yang diangkat peneliti menyangkut judul tentang Pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDes) dalam mengurangi Tingkat kemiskinan di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala, diketahui hasil penelitian tersebut adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes dalam mengurangi kemiskinan, sedangkan penelitian sebelumnya membahas peningkatan ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah adanya BUMDes dan masalah pendapatan masyarakat sebelum menggunakan BUMDes dalam mengentaskan kemiskinan.

² Mutiara, "Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengurangi Kemiskinan Didesa Kalukubula Kecamatan Sigi kabupaten Donggala" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, IAIN Datokarama, Palu, 2017).

³Andriani Sari, "Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai" Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017).

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama di dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.

Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” sejak digulirkannya inpres No. 5/1993 yang kemudian dikenal sebagai inpres desa tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan saudara kembar yang selalu menjadi topic dan kata kunci dari upaya pembangunan.⁴

Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk meretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak, dengan adanya pendampingan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah diyakini mampu mendorong kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk hidup mandiri.

Menurut defenisinya pemberdayaan dicitakan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri maka masyarakat harus diberi kekuatan atau daya agar mampu menggali sumberdaya yang dimiliki, pemberdayaan dalam hal ini merupakan usaha yang

⁴Aprilia Theresia, Krishna, Andini, Ed AII, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung ; Alfaberta, 2015), 155

menungkinkan masyarakat bisa ambil bagian, baik dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan secara bebas dan dilindungi, juga untuk ambil bagian dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasib mereka dengan demikian, pekerjaan pemberdayaan senantiasa akan menyentuh dua aspek sekaligus, yakni mengusahakan agar masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengaktualisasikan diri.⁵

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁶ Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.⁷

Selain itu pengertian pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.⁸

⁵Dadang Julaintara *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta; Laporan Pustaka Utama 1999), 197

⁶Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), 42

⁷Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996), 145

⁸ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), 77-78.

Dari beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat di kemukakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.

Didalam surah Al-Hujarat ayat 11-13

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS, Al-Hujarat 11).⁹

⁹ Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahannya (QS, Al-Hujarat 11), 515

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (QS, Al-Hujarat 12).¹⁰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS, Al-Hujarat 13).¹¹

Di dalam ayat ini menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah Allah menegaskan adab-adab (pekerti) yang harus berlaku diantara sesama mukmin, dan juga menjelaskan beberapa fakta yang menambah kuukuhnya persatuan umat islam dalam memberdayakan masyarakat, yaitu:

- a. Menjauhkan diri dari berburuk sangka kepada yang lain agar bisa memberdayakan masyarakat sekitar.

¹⁰ Ibid, 517

¹¹ Ibid, 517

- b. Menahan diri dari memata-matai keaiban orang lain, dan tidak menghina pekerjaan yang dilakukan masyarakat sekitar.
- c. Menahann diri dari mencela dan menggunjing orang lain.

2. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Pembeerdayaan masyarakat sesungguhnya upaya merubah pola perilaku masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian lewat beberapa aspek yaitu, aspek perlindungan sosial dan aspek peningkatan kapasitas.

Di bidang perlindungan sosial dan ekonomi, kebijakan pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk menanggulangi maslah bencana alam, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bantuan kepada masyarakat miskin, termasuk didalamnya fasilitas pembentukan BUMDes dan pengembangan kawasan pedesaan. Sementara dibidang peningkatan kapasitas, kebijakan pemberdayaan masyarakat harus menjawab masalah sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD, masalah kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan infrastruktur pendukung. Untuk bidang peningkatan akseibilitas, harus diarahkan untuk menyediakan akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi dan akses terhadap pembiayaan.¹²

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang didasari oleh prinrsip pemihakan kepada mereka yang lemah dan dilemahkan, agar mereka mempunyai posisi tawar sehingga mampu memecahkan masalah dan mengubah kondisi serta porsinya. Pemberdayaan dengan pengertian ini meliputi langkah perbaikan kualitas hidup rakyat, yang tidak hanya diukur dari peningkatan ksejahteraan

¹² [https://mimbarrakyatnews.com/Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat](https://mimbarrakyatnews.com/Pentingnya_Pemberdayaan_Masyarakat), (diakses pada tanggal 25 Oktober 2021).

yang bersifat ekonomis, tetapi juga kuasa dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan, pemberdayaan berarti usaha mendorong proses transformasi relasi kuasa yang timpang, menjadi relasi baru yang adil dan setara. Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga aspek yaitu.¹³

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang meningkatkan potensi masyarakat berkembang di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian masyarakat pasti sudah punah.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain hanya menciptakan iklim dan suasana, kekuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang yang membuat masyarakat menjadi berdaya.

Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah, oleh karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat, oleh karena itu, perlindungan dan penerukan kepada yang lemah mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Ketiga sisi aspek pemberdayaan tersebut merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian dalam pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun keberdayaan dengan mendorong, motivasi dan

¹³Aprilia Theresia, Krishna, Andini, Ed Ali, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Alfabeta,2014),.120.

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya dalam konteks pembangunan, yang didalamnya menyertakan relasi antara masyarakat dan Negara (pemerintah) maka pengorganisasian dimaksudkan untuk mengembangkan atau meningkatkan partisipasi dari masyarakat, suatu pengorganisasian masyarakat merupakan suatu usaha membangun kekuatan rakyat, sehingga rakyat dapat secara optimal memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan di sisi lain rakyat dapat memahami secara kritis lingkungannya serta mampu mengambil tindakan yang mandiri, merdeka dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi.

3. Faktor Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sudarmanto faktor pemberdayaan masyarakat dilaksanakan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada didalam kemiskinan dan keterbelakangan, upaya tersebut dimaksudkan guna membangun kemampuan masyarakat dengan cara mendorong kesadaran mereka, serta membangun potensinya.¹⁴ Selain itu masyarakat dinilai sebagai subyek mampu melakukan perubahan apabila terlepas dari kendali yang kaku dan mendapatkan kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan dan tindakan mereka.¹⁵

Faktor pemberdayaan masyarakat desa dilakukan untuk menggali minat dan partisipasi dari masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kemandirian desa, pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dimasukan pemerintah dalam peraturan pemerintah No 47 tahun 2015 pasal 27 poi (2).

¹⁴ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta,Kencana.2013), 162

¹⁵ Karjuni Dt. Maani , *Teori Actors Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Demokrasi. (Vol. X, No 1, 2011), 59.

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan membangun desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa.
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan memberdayakan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.
3. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas potensi dan nilai kearifan lokal.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
6. Mem fungsikan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa.
8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas dan sumberdaya manusia masyarakat desa.
9. Melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan dan melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.¹⁶

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah atau suatu lembaga pemberdayaan masyarakat agar masyarakat selalu tahu, mau dan mampu mengadopsi inovasi demi terciptanya peningkatan produktifitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat akan membutuhkan tenaga-tenaga fasilitator yang handal agar dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan.

Dari ketiga teori faktor pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa faktor pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan ketertinggalan,

¹⁶ Eko Putro Sadjojo, *Prioritas Penggunaan Dana*, Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 30 Juni 2015 .,24.

perekonomian masyarakat, kemandirian dan pemanfaatan potensi yang ada serta peningkatan sumber daya manusianya.

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat ekonomi desa. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut asas desentralisasi. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah Indonesia membentuk suatu badan usaha milik desa yang bertujuan untuk pemberdayaan dan membangun desa. Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan Desa, terutama meningkatkan perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁷

1. Landasan Hukum BUMDes

Landasan Hukum BUMDes. Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah.

a. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Pasal 213 ayat

(1) *“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”*¹⁸

¹⁷ Edy Yusuf Agunggunanto dkk, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Vol 13 no 1, 2016

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika system Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan*

b. PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa:

Pasal 78 yaitu:

- a. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa
- b. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa
- c. Sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa
- d. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa
- e. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- f. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

- a. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- b. 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari pemerintah desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota, pinjaman; dan/atau Penyertaan Modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil.

Selanjutnya dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMDes yaitu pada BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang berbunyi.¹⁹

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes
- b. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- c. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, dan diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes.

2. Pendirian BUMDes

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan persetujuan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa yang merupakan prakarsa masyarakat Desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat Desa. Berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya BUMDes mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Pengurus dan Pengelolaan BUMDes

Organisasi pengelolaan BUMDes hendaknya dilakukan terpisah dari Organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan Organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:

¹⁹ Undang-undang Desa 2014 (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), Bandung, 2014), 51

- a. Penasihat
- b. Pelaksana Operasional
- c. Pengawas

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri tentang Pedoman Tata dan Mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar paham dan dapat direalisasikan dengan cara yang sama oleh pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan Masyarakat. Dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat menolong kemajuan usaha BUMDes.
- c. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

- e. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainable*. Kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

4. Keuangan BUMDes

Masalah keuangan BUMDes secara umum diatur dalam Kemendagri nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDes yaitu dari pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Penprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan Kerjasama usaha dapat dilakukan BUMDes dengan pihak Swasta dan masyarakat. BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah kepada pemerintah daerah. Presentase permodalan BUMDes 51% adalah berasal dari Desa, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.²⁰

5. Tujuan (BUMDes)

Tujuan Badan Usaha Milik Desa Yaitu:

- a. Mendorong perkembangan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan desa

²⁰ Ari Sedesa, <https://sedesa.id/prinsip-pengelolaan-bumdes>. (di akses pada tanggal 25 Oktober 2021).

- c. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
 - d. Mendorong perkembangan usaha mikro sektor informal.²¹
6. Prinsip umum Pengelolaan (BUMDes).
- a. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *Kooperatif, prtisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara professional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri khas sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
 - b. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dan pihak luar, seperti dari pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah(Perda).
 - c. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan

²¹<https://infobumdes.id/tujuan-bumdes/> Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi (di akses pada tanggal 25 Oktober2021).

untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

- d. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (Kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Termasuk semua keterlibatan pemerintah Kabupaten.
- e. Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:
 - 1) Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian disektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat nusaha informal.
 - 2) Masyarakat Desa yang yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilan untuk modal penegmbangan usaha selanjutnya.

- 3) Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat.
- 4) Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperbruk oleh sistem pemasaran yang memberika kesempatan kepada pemilik modal untuk menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaanya. Secara umum BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar berkembang usaha masyarakat di Desa, Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya mengurangi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PAD desa, meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam maakukan penguatan ekonomo di desa.²²

D. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Defenisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, imdikiator maupun permasalahan lain yang melinkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan

²² Ari Sedesa, <https://sedesa.id/prinsip-pengelolaan-bumdes>. (di akses pada tanggal 25 Oktober 2021).

politik. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun nonmakan.²³

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Walaupun demikian belum tentu mereka itu sadar akan kemiskinan yang mereka jalani. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka miliki itu baru terasa pada waktu membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial ekonomi yang lebih tinggi.²⁴

Kemiskinan lazimnya digambarkan sebagai gejala kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Sebagai kelompok anggota masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan jika pendapatan kelompok anggota masyarakat ini tidak cukup untuk memenuhi kehidupan yang paling pokok seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemiskinan merupakan tema sentral dari perjuangan bangsa, sebagai inspirasi dasar dan perjuangan akan kemerdekaan bangsa dan motivasi fundamental dari cita-cita menciptakan masyarakat adil dan

²³ Makmun (2012), *Gambaran Kemiskinan dan Action Plann Penanganannya* PT Raka Grafika persada, (Jakarta, 2012), 10.

²⁴ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), 1-2

makmur. Garis kemiskinan, yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi pokok, dapat dipengaruhi oleh tiga hal : (1) persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlakukan, (2) posisi manusia didalam lingkungan sekitar, dan (3) kebutuhan objektif manusia untuk dapat hidup secara manusiawi.²⁵

Kemiskinan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, dan keterampilan.
2. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri seperti untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha.
3. Tingkat pendidikan mereka rendah, tidak sampai sekolah dasar karena harus membantu orangtua mencari tambahan penghasilan.
4. Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas (self employed) berusaha apa saja.
5. Banyak yang hidup di kota berusia muda, dan tidak mempunyai keterampilan.²⁶

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi

²⁵ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2015), 789

²⁶Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Refika Seditama, 1986), 228

geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Sampai saat ini jumlah penduduk Indonesia masi besar.²⁷

Menurut Soerjono, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.²⁸

Menurut Ravallion , kemiskinan adalah kelaparan tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat, orang miskin umumnya tidak membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit dan merupakan ketidakberdayaan, tertinggal dan tidak memiliki rasa bebas.²⁹

Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) bekerjasama dengan lembaga penelitian SMERU menjelaskan bahawa kemiskinan adalah kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.³⁰

Dari beberapa pernyataan mengenai pengertian kemiskinan menurut para ahli, dapat di simpulkann bahwa kemiskinan adalah ketidak sanggupun dalam menjalankan kehidupan dan ketidakmampuan dalam menepuh pendidikan diakibatkan tidak adanya keterampilan dan dana.

²⁷Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, 808-809

²⁸ [https://sosiologi79.com/2017/04/Pengertian Kemiskinan Menurut Para Ahli](https://sosiologi79.com/2017/04/Pengertian-Kemiskinan-Menurut-Para-Ahli/), (diakses pada tanggal , 25 Oktober 2021).

²⁹Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta, 2010), 299.

³⁰ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 122-123.

2. Aspek Kemiskinan

Secara garis besar, kemiskinan dapat dipilah menjadi tiga aspek, yaitu aspek primer, aspek sekunder, dan aspek ekonomi. Aspek primer berupa miskin aset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan. Sementara aspek sekunder berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi, jika dipandang dari aspek ekonomi, kemiskinan menunjuk pada situasi lemahnya daya beli dan keinginan dalam memenuhi kebutuhan dasar.³¹

3. Faktor Kemiskinan

Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan menurut Hartomo (1997) yaitu: pendidikan yang terlampau rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber daya alam. Sedangkan menurut Aziz faktor kemiskinan yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan keterbatasan modal, beban keluarga.

Selain itu menurut Sharp (dalam Kuncoro, 2006) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia, kualitas sumber manusia yang rendah berarti produktifnya rendah. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.³²

³¹ Ayu Setyo Rini, Lilik Sugiharti, *Faktor-faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan). 19

³² Rezza Attabiurobbi Annur, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejoko Kabupaten Kudus Tahun 2013*, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, (Economics Development Analysis Journal), 413.

Dari beberapa pernyataan tentang faktor kemiskinan, dapat di simpulkan bahwa faktor kemiskinan disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan dan tidak adanya lapangan pekerjaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang.

Pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Adapun langkah-langkah pelaksanaan penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya berikut :diawali dengan adanya masalah dengan menentukan jenis informasi yang diperlukan, menemukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data, dan menarik kesimpulan penelitian.¹

Penelitian ini lebih mendekati kesesuaian dengan topic kajian skripsi ini, yakni dengan pendekatan dalam bentuk “metode kualitatif”, yang menitik

¹Margono, *Metode Penelitian* (Cet. 2 Jakarta : Rineka Cipta, 2003), 50

beratkan kepada kegiatan penelitian dilokasi objek dalam melakukan penelitian yang ada, dengan tujuan memperoleh data ilmiah dan tidak menimbulkan hipotesis yang sifatnya menduga-duga berbagai hal yang menyangkut Pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDES) dalam mengurangi kemiskinan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala. Alasan penulis mejadikannya sebagai lokasi penelitian karena dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Banawah Tengah Kabupaten Donggala penulis menganggap Desa Lampo menjadi salah satu Desa yang dapat dijadikan representase sebagai Desa yang memiliki pemberdayaan masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan sehingga penulis memilih lokasi penelitian. Penulis sangat berharap agar dapat memperoleh nilai tambah dalam melakukan penelitian ini dan sebagai langkah awal bentuk pengabdian dan aplikasi keilmuwan selama melakukan studi.²

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran penulis sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran penulis dilokasi dalam usaha melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Kehadiran peneliti lokasi

² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed. Revisi, Cet, 12: Jakarta, 2002), 107.

penelitian bertindak selalu instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data.

Penulis dalam mengadakan penelitian di Desa Lampo Kecamatan Banawah Tengah Kabupaten Donggla, membawa surat keterangan penelitian dari Rektor Uin Datokarama Palu yang ditunjukkan kepada kepala Desa serta staf dan juga pengurus BUMdes yang akan menjadi sasaran interview. Surat tersebut merupakan surat permohonan izin penulis untuk melakukan penelitian di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala.

Dalam melakukan penelitian, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intens segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas di Desa Lampo. Para informan yang diwawancarai (interview) akan diupayakan dapat memberikan informasi yang akura dan valid.

D. Data dan Sumber Data

Pada hakekatnya, data bagi seorang penulis adalah sebagai alat atau dasar utama dalam pembuatan keputusan atau pemecahan masalah. Oleh karena itu, data yang diambil harus benar-benar memenuhi kriteria yang dijadikan alat dalam mengambil keputusan.

Menurut J. Supratno data sebagai alat pengambil keputusan atau pemecah permasalahan itu harus secara tepat dan benar. Data yang baik adalah data dapat dipercaya kebenarannya (reliable). Tepat waktu dan mencakupi ruang yang luas

serta dapat memberikan gambaran yang jelas tentang suatu Masalah secara menyeluruh, sistematis, dan komprehensif.³

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi atau perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Selanjutnya untuk memperoleh data yang obyektif. Maka dalam penelitian penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang di anggap representatif dalam mendukung terselenggaranya penelitian antara lain:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data yang mengharuskan penelitian turun kelapangan melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti yang berkaitan dengan ruang (tempat), pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa atau kejadian, tujuan dan perasaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Indriantoro dan supomo bahwa observasi adalah “proses

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed. Revisi, Cet, 12: Jakarta, Rineka Cipta 2002), 109.

proses pencatatan pada pola perilaku subyek (orang), obyek (benda-benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti.” Di penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap program usaha BUMDes yang ada di Desa Lampo.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (in depth interview). Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terlihat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Dengan demikian maka teknik interview merupakan teknik penulis dalam upaya memperoleh data melalui tanya jawab atau wawancara langsung antara penulis dan informan atas dasar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapat informasi yang lengkap tentang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mengurangi Kemiskinan di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam wawancara adalah pedoman wawancara dengan menggunakan alat perekam suara sebagai pendukung wawancara.,. Yang akan menjadi informan dalam wawancara ini adalah Kepala Desa selaku penasihat BUMDes, ketua BUMdes, ketua korditor unis usaha BUMDes dan sekertaris BUMDes serta masyarakat yang diberdayakan dalam program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala.

3. Dokumentasi

Teknik lain yang dapat digunakan penulis selama mengadakan penelitian untuk memperoleh data dilapangan adalah himpunan dokumen-dokumen dilingkungan Desa Lampo. Serta dalam dokumentasi ini penulis juga menggunakan kamera sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah jumlah data dan keterangan berhasil dkumpulkan penulis, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptif menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain:

1. Reduksi Data

Yaitu penulis merangkum beberapa data yang diperoleh dilapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukan dalam pembahasan ini termasuk didalamnya data tentang

pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan yang di program oleh BUMdes Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala.

2. Penyajian Data

Yaitu setelah jumlah data dikumpulkan dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data yang tersedia. Sekanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang dijabarkan pada hasil penelitian dilapangan.

3. Verifikaasi Data

Yaitu sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan proposal skripsi ini akan diseleksi kebenaran dan validitasnya, sehingga data yang masuk dalam pembahasan ini adalah data otentik dan tidak diragukan kebenarannya.

Jelas bahwa urutan-urutan data teknik analisis data ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menjabarkan uarian-uarian analisis data dan bukan dalam bentuk statistik inferensia, sehingga teknik analisis data adalah mengurikan beberapa hak yang diperoleh selama penelitian dan tidak dijabarkan dalam bentuk statistik.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data adalah salah satu tahapan yang peneliti lakukan. Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapaun cara yang dilakukan dengan cara triangulasi.

Triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dan penelitian kualitatif. Dalam kaitan ini Patton menyatakan empat macam triangulasi, yaitu (1) triangulasi data (*data triangulation*), (2) triangulasi penelitian (*investigator triangulation*), (3) triangulasi metodologis (*methodological triangulation*), dan (4) triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*).

1. Triangulasi Data

Triangulasi data yaitu mengarahkan peneliti agar didalam mengumpulkan data, wajib menggunakan sumber data yang tersedia artinya data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari data yang berbeda. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu, bisa lebih teruji bilamana dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda, baik kelompok sumber sejenis ataupun yang berbeda. . Dalam hal ini penulis melakukan triangulasi atau metode pengumpulan data terhadap beberapa informan seperti sekretaris BUMDes, ketua kordinator unit usaha BUMDes, sekertaris Desa dan masyarakat.

2. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti adalah hasil penelitian baik data ataupun kesimpulan mengenai bagian tertentu dan keseluruhannya bisa diuji valititasnya dari beberapa peneliti. Dari pandangan dan tafsir beberapa peneliti terhadap semua informasi yang berhasil digali dan dikumpulkan, diharapkan bisa terjadi pertemuan pendapat yang pada akhirnya bisa lebih menampilkan hasil penelitian.

3. Triangulasi Metode

Triangulasi metode yaitu peneliti melakukan pengumpulan data sejenis, tetapi menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Teknik triangulasi ini juga bisa dilakukan dengan wawancara dan juga angket (Pertanyaan tertulis) yang dikirimkan kepada sumber informasi yang menjadi sasarannya.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi teori ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.⁴

Jadi pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya. Dalam hal ini penulis mengadakan peninjauan kembali, apakah fakta analisis dari seluruh data yang diperoleh benar-benar dan terjadi dilokasi tempat diadakannya penelitian

⁴ Muhammad Tholchah Hasan dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif Teoritis & Praktis*" (Cet.3, Surabaya: Visipres Media,2009),147.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Lampo

1. Profil Desa Lampo

Desa lampo merupakan desa yang terletak di Propinsi Sulawesi tengah lebih tepatnya di Kecamatan Banawah Tengah Kabupaten/kota Donggala. Dulunya Desa lampo merupakan bagian dari Desa Lumbudolo yang berstatus Dusun 4 dari beberapa Dusun yang ada di Desa Lumbudolo, kemudian pada tahun 2014 sampai 2015 bahwa Desa lampo akan di mekarkan dengan persyaratan harus mempunyai penduduk yang wajib memilih dia atas 500 KK dan harus mempunyai fasilitas Desa seperti Lapangan Sepak Bola, Sekolah dan Rumah Ibadah atau Masjid, pada tahun 2015 fasilitas yang menjadi persyaratan untuk memekarkan desa akhirnya terealisasikan sehingga Desa Lampo terbentuk pada tahun 2015 dengan dasar pembentukan permendagri nomor: 12 tahun 2007, dengan nomor kode wilayah Kemendagri 72.03.27.2008. sehingga Desa Lampo resmi berstatus Sebagai Desa dan berpisah dengan Desa Lumbudolo.¹

Luas desa lampo adalah 832 hektar. Adapun letak pebatasan Desa Lampo adalah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Teangah, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tosale kecamatan Banawa Selatan dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Loli Dondo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala, sedangkan orbitasi jarak dari Desa Lampo ke

¹ Data arsip Desa Lampo, 2015

pusat pemerintahan yaitu,5 Km menuju ke pusat pemerintahan Kecamatan, jarak dari pusat pemerintahan kota berjarak 15 Kota, jarak ke pusat pemerintahan kabupaten sejauh 15 Km, dan ke pusat pemerintahan Ibukota Provinsi berjarak 45 Km.

2. Kondisi Penduduk di Desa Lampo

Menurut data kependudukan di desa lampo pada tahun 2021, jumlah penduduk desa lampo adalah 879 jiwa dengan kepala keluarga sebanyak 245 KK lebih lanjut dijelaskan jumlah penduduk dari segi usia sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Dilihat dari Usia

NO	Golongan Umur	Jumlah
1	0-12 Bulan	17 jiwa
2	1-4 Tahun	35 jiwa
3	5-14 Tahun	196 jiwa
4	15-39 Tahun	423 jiwa
5	40-64 Tahun	182 jiwa
6	65 Tahun ke atas	26 jiwa
	Jumlah Total	879 jiwa

Sumber : Data Kependudukan Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah kabupaten Donggala

Berdasarkan tabel 1 Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Tingginya prosentase usia produktif baik laki-laki maupun perempuan di Desa Lampo menjadi sebuah peluang bagi masyarakatnya untuk lebih berkembang.

Tabel 2. Jumlah penduduk dilihat berdasarkan pekerjaan

No	Tingkat pekerjaan	Jumlah
1	Petani dan buruh tani	50 jiwa
2	Buruh kasar	50 jiwa
3	Pegawai Swasta	6 jiwa
4	Perawat (swasta/Honorer)	1 jiwa
5	Wiraswasta/Pedagang	20 jiwa
6	Jumlah	127 jiwa

Sumber : Data Kependudukan Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah kabupaten Donggala

Dilihat dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah petani lebih dominan dibandingkan dengan wiraswasta, pegawai, dan perawat yang berada di desa Lampo, sehingga perekonomian dan tingkat pendapatan masyarakat yang ada di desa Lampo tergolong di bawah artinya pendapatan masyarakat yang ada di desa Lampo hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Kondisi Sosial Masyarakat di Desa Lampo

Masyarakat Desa Lampo hidup rukun dan aman tidak memperlakukan antara beda agama, suku, dan sosial budaya, demi untuk kemajuan bersama, pernyataan ini terungkap dari hasil wawancara kepala desa Lampo

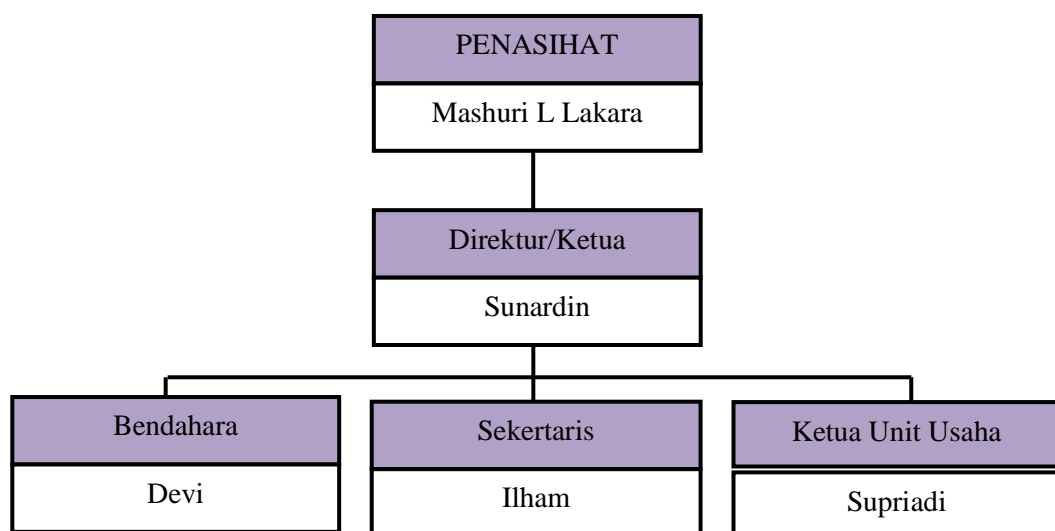
“Bahwa kondisi sosial masyarakat Desa Lampo penduduknya mayoritas beragama Islam. Selain itu, Mayoritas penduduk di Desa Lampo Rata-rata pekerjaan mereka yaitu petani, dan ada yang jadi buruh bangunan, untuk itu pendapatan ekonomi masyarakat desa lampo tidak menentu dan kadang juga mengalami gagal panen bagi yang bertani sedangkan yang jadi buruh, mereka hanya mendapatkan pekerjaan ketika ada pemborong dari kota yang datang mencari tenaga kerja, itupun kadang-saja. Jadi tingkat perekonomian masyarakat desa lampo masih dibawa rata-rata, artinya tingkat kemiskinan yang ada di desa Lampo masih banyak.”²

B. Gambaran umum BUMDes Desa Lampo

1. Struktur pengurus BUMDes

Sesuai dengan data yang diberikan oleh kepala BUMDes, berdasarkan surat keputusan kepala desa pada tanggal 1 januari 2020 menetapkan komposisi pengurus dan dewan pengawas periode 2020 s/d 2024 adalah sebagai berikut:

Struktur Pengurus Inti BUMDes Desa Lampo



Sumber: Data profil Desa Lampo

2. Modal usaha BUMDes

Sesuai data berdasarkan dengan hasil wawancara bersama bendahara BUMDes Desa Lampo, di ketahui bahwa BUMDes memiliki modal usaha puluhan juta bahkan ratusan juta dari periode 2020 hingga periode 2021, berikut kutipan wawancara yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini.

“Untuk modal awal, BUMDes diberikan modal dari pemerintah desa yang berasal dari dana desa (DD) sebesar 80.000.000 (delapan puluh juta) pada tahun 2020 dan itu masih dalam tahap pengembangan, lalu pada pertengahan tahun 2021 kami mendapat tambahan modal sebesar

² Mashuri, Kepala Desa Lampo, “*Wawancara*”, Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala, pada tanggal 26 November 2021

120.000.000 (seratus dua puluh juta) dari anggaran dana desa (ADD) jadi total modal usaha yang diperoleh BUMDes berjumlah 200 juta.”³

Di ketahui bahwa modal ditahun 2020 berjumlah 80.000.000. (Delapan ratus juta rupiah) dan masih dalam tahap perkembangan demikian pula dengan modal pada tahun 2021 mencapai 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan mendapatkan anggaran dari dana desa (ADD) sehingga modal keseluruhan berjumlah 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), untuk lebih memahami pernyataan yang di berikan oleh informan peneliti menuangnya dalam tabel berikut ini.

TABEL 1. MODAL USAHA BUMDES DESA LAMPO

No	Uraian	2020	2021	Naik/Turun
1	Modal awal dari dana desa (DD)	80.000.000	0	80.000.000
2	Modal tambahan Dari Anggaran Dana Desa (ADD)	0	120.000.000	120.000.000
Jumlah				Rp. 200.000.000

Sumber Data: Permodalan dan Keuangan BUMDes

Mengenai modal awal BUMDes sesuai dengan hasil kesepakatan dari pihak pengelolaan BUMDes dan pemerintah desa yang mana modal awal yang diberikan kepada BUMDes yaitu satu unit Mobil pickup dan uang senilai 80 juta yang berasal dari dana desa (DD) dan pada tahun 2021 BUMDes menerima dana tambahan dari anggaran dana desa (ADD). Sesuai yang di katakana oleh informan berikut ini

³ Devi Bendahara BUMDes Desa Lampo “Wawancara” 27 November 2021

“Pada awal pembentukan BUMDes, pihak pemerintah desa dan pihak pengelola BUMDes, kami melakukan musyawarah untuk membahas tentang modal awal yang akan di berikan kepada BUMDes dimana modal yang diberikan kepada kami yaitu senilai 80 juta dan 1 unit mobil pickup untuk operasional BUMDes terus modal 80 juta itu kami salurkan untuk program simpan pinjam dan usaha penjualan gas LPG 3 Kg dan untuk modal tambahan pada pertengahan tahun 2021 senilai 120 juta itu kami peruntukan untuk perbaikan dan pembangunan fasilitas wisata sebab kami melihat bahwa wisata itu harus kami bangun sebab banyaknya pengunjung yang datang dan itu sangat membantu untuk perekonomian masyarakat desa karena diwisata itu nanti yang kerja disana masyarakat dan pemuda yang tidak punya kerja.”⁴

Dari pernyataan tersebut, disampaikan bahwa modal awal BUMDes Desa Lampo yang diberikan oleh pemerintah Desa sebesar 80 juta dan 1 unit mobil pickup serta ketambahan modal pada tahun 2021 sejumlah 120 juta, untuk modal tersebut di peruntukan untuk modal usaha penjualan Gas LPG dan pembangunan fasilitas wisata Desa karena dengan adanya wisata tersebut bisa meningkatkan perekonomian dan pengurangan pengangguran yang ada di Desa Lampo.

3. Dampak BUMDes terhadap masyarakat

Eksistensi Bumdes memberikan dampak pada perkembangan dan kemajuan desa. Sejalan dengan wawancara yang di lakukan peneliti kepada informan dikethui bahwa BUMDes memiliki dampak positif apalagi dari sisi ekonomi pernyataan ini dikutip dari informan berikut ini.

“Begitu adanya BUMdes ini masyarakat akhirnya bisa punya kerja, seperti anak muda bisa kerja di wisata air terjun itu ada juga yang kerja jadi buruh tenda ada juga yang jadi sopir mobil BUMdes, seperti gas LPG kalau dulu stengah mati sekali di cari baru mahal sekali harganya kalau tidak beli di subsidi, bahkan ada yang jual sampe 40 ribu, tapi kalau sekarang sudah mudah karna BUMdes bajual gas LPG harganya juga murah cuman 16 ribu. Apa lagi seperti saya ini yanga jual pisang goreng cepat sekali habis gas jadi

⁴Ilham Sekertaris BUMDes Desa Lampo “Wawancara” 27 November 2021

kadang saya beli langsung dua, jadi pas ada BUMDes masyarakat itu kaya terbantu sekali.”⁵

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kehadiran BUMDes sangat membantu masyarakat dari segi ekonomi dan kebutuhan masyarakat, seperti membuka lapangan pekerjaan, utamanya dibidang wisata alam. Selain itu ada pula yang menjadi buruh dan sopir pada persewaan tenda yang dimiliki oleh BUMdes. Dampak positif lainnya adalah mobilisasi kebutuhan dasar masyarakat menjadi mudah, seperti akses mendapatkan gas LPG yang pada gilirannya membantu meningkatkan perekonomian di desa Lampo bagi para pelaku usaha.

C. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengurangi Tingkat kemiskinan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan ini mencakup beberapa bidang, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan di bidang pendidikan dan pemberdayaan di bidang keterampilan.

Berikut ini beberapa program pemberdayaan terkait pemberdayaan ekonomi, keterampilan dan pemberdayaan pendidikan:

1. Pemberdayaan di bidang ekonomi

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes, bentuk program pemberdayaan ini berupa permodalan usaha bagi masyarakat,

⁵Ibu Lita masyarakat Desa Lampo “Wawancara” 29 November 2021

pengelolaan sumber daya alam. Dengan adanya pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

2. Pemberdayaan di bidang keterampilan

Pemberdayaan di bidang keterampilan merupakan program pemerintah dalam meningkatkan kemajuan desa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, yaitu dengan menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk menghasilkan berbagai macam jenis keterampilan masyarakat.

3. Pemberdayaan di bidang pendidikan

Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya di tujukan kepada para pelajar saja, namun juga kepada masyarakat. Bentuk dari pemberdayaan ini berupa pelatihan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat yang berkualitas dan kompeten.⁶

Pemerintah Desa Lampo mendirikan BUMDes untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan pendapatan masyarakat dengan

⁶ Admin Desa Amin jaya <https://aminjaya.desa.id/page/detail/program-pemberdayaa-masyarakat-desa>.

memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa Lampo, masyarakat ikut berpartisipasi dengan adanya program BUMDes yang bisa membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pernyataan ini diambil dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan berikut ini.

“Untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa Lampo serta mengurangi jumlah pengangguran yang ada kami dari pemerintah yang ada di Desa Lampo berinisiatif untuk membangun suatu lembaga yang mana lembaga itu yang mengelola sumber daya yang ada untuk di manfaatkan sehingga dapat membantu perekonomian yang ada di Desa Lampo itu sendiri sehingga dengan sendirinya di kampung ini punya lapangan pekerjaan,”⁷

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa BUMDes Desa Lampo berperan besar dalam meningkatkan perekonomian dan mampu menurunkan angka pengangguran. Peran besar tersebut tidak terlepas dari inisiatif pemerintah desa Lampo untuk membangun suatu lembaga dengan program kerja yang dapat bermanfaat bagi desa, lembaga tersebut dikenal dengan BUMdes desa Lampo.

Lebih lanjut dijelaskan dari hasil wawancara bahwa program BUMdes yang ada di Desa Lampo sangat variatif. Sejalan dengan hasil wawancara yang dikutip oleh peneliti berikut ini.

“Terkait dengan program usaha yang dilakukan oleh BUMDes demi peningkatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan yang ada di masyarakat, kami dari pihak BUMDes memprogramkan beberapa program usaha seperti jasa sewa tenda, jasa penyewaan mobil, simpan pinjam dana serta pengelolaan wisata desa dan yang terakhir penjualan gas LPG 3 Kg,”⁸

Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan bahwa BUMDes Desa Lampo mempunyai beberapa program usaha untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi

⁷ Mashuri L lakara Kepala Desa lampo “*Wawancara*” Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala 26 November 2021.

⁸ Mashuri L Lakara “*Wawancara*” 28 November 2021

dan upaya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang ada di desa Lampo, yaitu program jasa sewa tenda, penyewaan mobil, simpan pinjam dana, pengelolaan wisata desa dan penjualan gas elpiji. Penjelasan setiap program diuraikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Jasa sewa tenda terowongan

Jasa sewa tenda adalah salah satu dari beberapa program desa yang dilakukan oleh BUMDes. Pernyataan ini dikutip dari hasil wawancara dengan ketua kordinator unit usaha BUMDes Desa Lampo:

Jadi tenda terowongan juga merupakan salah satu kebutuhan yang susah di dapatkan di kawasan kecamatan banawa tengah sehingga BUMDes memprogramkan usaha tersebut dan juga usaha jasa sewa tenda cukup membantu meningkatkan modal usaha BUMDes, selain itu anak muda yang tidak punya kerja bisa diberdayakan untuk bekerja jadi buruh pasang tenda⁹

Dari pernyataan tersebut, dipahami bahwa usaha jasa sewa tenda adalah bagian dari usaha BUMDes. Usaha ini membawa dampak positif pada peningkatan modal usaha BUMDes. Dampak positif lainnya yang dirasakan pada masyarakat adalah terbukanya lapangan pekerjaan.

2. Jasa penyewaan mobil

Selanjutnya jenis usaha yang kedua yaitu jasa penyewaan mobil. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan, diketahui bahwa jasa penyewaan mobil memberikan dampak besar pada mobilisasi masyarakat desa Lampo. Demikian kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan :

“Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pihak BUMDes bahwa di desa Lampo masi sangat kurang kendaraan umum, sehingga BUMDes

⁹Supriadi Kordinator Unit Usaha BUMDes Desa Lampo “Wawancara” 23 November 2021

memprogramkan jasa penyewaan mobil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pengantaran orang yang sakit, membantu masyarakat untuk pengantaran barang dagangan ke pasar dan juga jasa rental, dan untuk harga penyewaannya itu tidak menentu, biasanya tergantung dari jarak dan barang yang dimuat, tapi kalau untuk pengantaran orang yang sakit dan kebutuhan lain masyarakat itu tidak dibebankan sama sekali karna tujuan dari program ini untuk membantu kebutuhan masyarakat.”¹⁰

Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa penyewaan mobil merupakan kebutuhan masyarakat desa Lampo. Warga yang selama ini terbatas akses transportasi, mendapatkan kemudahan dengan adanya program ini. Semisal warga yang sakit atau warga yang mengantar dagangan ke pasar, dan kebutuhan lainnya, dapat dengan mudah memperoleh kendaraan.

3. Simpan pinjam modal

Jenis usaha yang berikutnya adalah simpan pinjam modal, berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan diketahui bahwa usaha simpan pinjam modal sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan modal untuk membuka usaha, dapat dilihat dari kutipan hasil wawancara peneliti kepada informan berikut ini:

“Untuk Usaha simpan pinjam, ini sangat membantu bagi masyarakat karena pada saat masyarakat mengalami gagal panen, BUMDes siap memberikan modal usaha untuk menutupi kerugian yang dialami oleh masyarakat, selain itu program ini memang dikhususkan untuk membantu masyarakat, apalagi yang mempunyai usaha kecil seperti warung dan beberapa usaha seperti yang buka kios dan lain sebagainya agar supaya masyarakat yang ada di desa lampo bisa mempunyai penghasilan sendiri.”¹¹

Dari hasil wawancara peneliti kepada informan bahwa usaha simpan pinjam modal membantu masyarakat dalam hal peningkatan penghasilan

¹⁰ Supriadi ketua Kordinator Unit Usaha BUMDes “Wawancara” 23 November 2021

¹¹ Supriadi ketua Kordinator Unit Usaha BUMDes “Wawancara” 23 November 2021

masyarakat serta membantu masyarakat dalam mendapatkan modal usaha, selain itu dampak positif lainnya yaitu dapat menutupi kerugian yang dialami oleh masyarakat contohnya terjadinya gagal panen. Dengan adanya program simpan pinjam yang di lakukan oleh BUMDes, masyarakat dapat melanjutkan usaha dengan meminjam modal kepada BUMDes, yang pada gilirannya menghidupkan ekonomi warga desa Lampo.

4. Pengelolaan wisata desa

Selanjutnya adalah program usaha pengelolaan wisata desa. sehubungan wisata yang ada masi dalam tahap pembangunan fasilitas sehingga belum bisa dibuka untuk masyarakat umum, namun sudah berjalan dan sudah ada pengunjung yang datang dari masyarakat lokal. Demikian hasil wawancara yang dikutip peneliti kepada informan:

“Sebelumnya sudah berjalan dan Alhamdulillah hasil yang didapatkan di wisata tersebut terbilang cukup menjanjikan sebab pengunjung yang sering berdatangan apa lagi kalau hari laibur. Selain itu bahwa pengelolaan wisata tersebut akan diprioritaskan untuk membantu masyarakat yang tidak punya pekerjaan, sebab yang akan mengelola dan bekerja di wisata tersebut adalah masyarakat dan otomatis masyarakat akan mempunyai penghasilan tersendiri, sebab sebelum wisata tersebut di buka secara resmi suda banyak pengunjung yang datang. Apa lagi kalau pembangunan fasilitasnya suda selesai dan suda dibuka dan dipublikasikan otomatis penguunjung akan lebih banyak lagi.”¹²

Hasil wawancara ini mengindikasikan bahwa program usaha pengelolaan wisata desa dapat meningkatkan pendapatan ekonomi yang ada di Desa Lampo, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yang tentu membantu peningkatan kesejahteraan warga desa Lampo.

5. Penjualan Gas LPG 3 Kg

¹² Supriadi Ketua Kordinator Unit Usaha BUMDes “Wawancara” 23 November 2021

Program usaha yang terakhir adalah penjualan Gas LPG 3 Kg Sesuai hasil wawancara bersama ketua atau direktur BUMDes yang ada di Desa Lampo diketahui bahwa:

“Bumdes harus memprogramkan usaha penjualan Gas LPG 3 Kg karna mengingat gas LPG sangat dibutuhkan masyarakat dan itu sangat membantu bagi masyarakat yang membuka usaha-usaha mikro seperti adanya warung kecil, penjual mie, penjual pisang goreng dan lain sebagainya, karna sebelumnya banyak masyarakat yang memberikan masukan kepada kami agar memprogramkan gas LPG 3 Kg karena kalau masyarakat kehabisan gas mereka biasanya sampai sehari-hari menunggu pasokan gas yang datang di pangakalan”¹³

Dari kutipan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa program usaha penjualan gas LPG 3kg menjadi faktor makro terjadinya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan warga desa Lampo. Ketersediaan Gas LPG 3 kg, membantu secara signifikan pada pelaku usaha di desa Lampo, dalam hal penjualan produk usaha seperti menjual pisang goreng, warung mie ayam, dan lainnya.

Pada prinsipnya, Direktur atau ketua BUMDes dan kepala desa betul telah membangun usaha untuk memberdayakan masyarakat melalui program BUMDes dan membantu kebutuhan masyarakat dan upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Lampo.

D. Faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik desa dalam mengurangi tingkat kemiskinan

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis menguraikan ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui Badan usaha milik desa yaitu sebagai berikut :

¹³ Sunardi Ketua BUMDes Desa Lampo “Wawancara” 28 November 2021

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung merupakan salah satu penunjang bagi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Desa Lampo, adapun beberapa faktor pendukung yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya alam

Melimpahnya sumber daya alam sangat membantu dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bagi masyarakat desa Lampo, sesuai dari hasil wawancara dengan informan berikut ini.

“Pembangunan suatu daerah selalu didasarkan kepada pemanfaatan sumber daya alam. Makin banyak sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah maka akan baik pembangunan yang ada di daerah tersebut dan didukung oleh pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, maka makin baiklah harapan akan tercapainya keadaan kehidupan ekonomi yang baik di daerah tersebut, serta bisa menjamin kelangsungan hidup masyarakatnya.”¹⁴

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan dapat menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga akan terbangun ekonomi yang baik di daerah tersebut.

2. Sumber Daya Manusia

Bukan cuma sumber daya alam saja, sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu kemajuan ekonomi suatu daerah, dapat dilihat dari kutipan berikut ini:

“Peningkatan ekonomi dan sejahteranya kehidupan masyarakat bukan hanya ditunjang oleh sumber daya alamnya saja melainkan sumber daya manusianya juga, sumber daya manusia yang terampil dan kreatif akan sangat berguna dalam mengelola sumber daya alam untuk dijadikan suatu

¹⁴ Mashuri L Lakara Kepala Desa Lampo “Wawancara” 28 November 2021

program usaha atau bisnis, sehingga ekonomi di suatu daerah akan terdongkrak dengan sendirinya.”¹⁵

Sesuai dengan kutipan diatas ditunjukkan bahwa sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam proses peningkatan ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat karena dengan sumber daya manusia yang kreatif dan terampil bisa mengelola sumber daya alam menjadi suatu peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana juga sangat membantu dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada informan berikut ini

“Semakin bagus Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu daerah maka akan semakin bagus peningkatan ekonomi di daerah tersebut, misalnya tersedianya fasilitas kendaraan maka akan lebih mudah masyarakat dalam pendistribusian barang dagangan ke pasar.”¹⁶

Dari pernyataan tersebut ditunjukkan bahwa sarana dan prasarana sangat membantu dalam peningkatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti adanya fasilitas kendaraan yang membantu dalam pendistribusian barang dagangan ke pasar.

b. Faktor penghambat

Adapun faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Lampo adalah sebagai berikut:

1. Minimnya sumber daya manusia atau SDM yang ada di Desa Lampo Dari hasil wawancara bersama bapak kepala desa, beliau mengatakan

¹⁵ Mashuri L Lakara Kepala Desa Lampo “Wawancara” 28 November 2021

¹⁶ Mashuri L Lakara Kepala Desa Lampo “Wawancara” 28 November 2021

Untuk memajukan taraf perekonomian di suatu daerah baik pemerintah ataupun masyarakatnya harus memiliki SDM yang mumpuni artinya masyarakatnya mudah diajak bekerjasama untuk membangun daerah tersebut, misalnya mudah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ataupun program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. jadi masyarakat harus paham dengan program yang sedang dijalankan oleh pemerintah, sebab dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah bisa menghasilkan berbagai macam ide untuk mengelola sumber daya alam yang ada¹⁷

Diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa untuk peningkatan ekonomi suatu daerah bukan hanya didukung oleh sumber daya alamnya melainkan juga oleh sumber daya manusia yang ada sehingga dalam upaya peningkatan ekonomi bisa lebih mudah.

2. Terbatasnya kuota Gas LPG

Sehubungan dengan terbatasnya gas LPG, menurut bapak Supriadi Selaku kordinator unit usaha BUMDes,

bahwa penjualan gas LPG ini sebenarnya cukup menunjang dalam membantu masyarakat untuk peningkatan ekonomi sebab dengan adanya gas LPG ini masyarakat sangat terbantu, karena sebagian masyarakat itu mempunyai usaha-usaha warung seperti penjual pisang goreng, penjual mie dan lain sebagainya dan kebanyakan sudah berlangganan untuk pembelian gas, pada saat gas LPG belum masuk di desa Lampo masyarakat yang mempunyai usaha tersebut akan terhambat usahanya, jadi menurut saya ini salah satu faktor penghambat bagi kami dalam peningkatan ekonomi.¹⁸

Sesuai kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa terbatasnya kuota LPG dapat mempengaruhi usaha BUMDes dalam peningkatan ekonomi, karena usaha masyarakat akan terhambat dan program usaha yang dilakukan oleh BUMDes juga akan mengalami keterhambatan.

3. Keterbatasan Modal

¹⁷ Mashuri L Lakara Kepala Desa Lampo "Wawancara" 28 November 2021

¹⁸ Supriadi Ketua kordinatur Unit usaha BUMDes Desa Lampo "Wawancara" 23 November 2021

Untuk faktor penghambat lainya yaitu keterbatasan modal, sesuai dengan hasil wawancara dengan informan berikut ini

BUMDes sebenarnya masi punya banyak program pemberdayaan masyarakat dan program usaha yang sangat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat yaitu dengan pengelolaan sumber daya yang ada seperti pemberdayaan di bidang pendidikan, pemberdayaan di bidang keterampilan dan program usaha pengelolaan air bersih dan air minum dalam kemasan, tapi kami terhambat di modal yang terbatas, sebab anggaran dana desa atau ADD untuk tahun ini banyak dialihkan ke penanganan Covid 19, jadi modal yang diberikan hanya seadanya untuk program yang bisa jalankan.¹⁹

Dari hasil wawancara peneliti lakukan dengan informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keterbatasan modal memang sangat menjadi faktor utama dalam suatu usaha karena berkurangnya modal maka akan berpengaruh kepada pemberdayaan masyarakat dan usaha BUMDes baik dari penjualan dan penambahan stok usaha BUMDes

¹⁹ Sunardi Ketua BUMDes Desa Lampo “*Wawancara*” 28 November 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Lampo, adanya sebuah program usaha BUMDes yang di mana program tersebut sangat membantu perekonomian masyarakat yaitu program simpan pinjam dan program wisata desa sangat membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Faktor pendukung yaitu banyaknya sumber daya alam yang ada di desa lampo, dan itu bisa di dimanfaatkan oleh pemerintah, dikelola dengan baik sehingga dapat membantu dalam peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa serta mengurangi tingkat kemiskinan, selain itu yang menjadi faktor pendukung lainnya adalah sumber daya manusia dan sarana dan prasarana juga menjadi bagian yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi di suatu daerah. Sedangkan faktor Penghambat pemberdayaan masyarakat dalm mengurangi tingkat kemiskina melalui BUMDes yaitu minimnya SDM dan kurangnya modal usaha yang diberikan kepada BUMDes dan terbatasnya kuota LPG sehingga pengelolaan usaha tidak sesuai dengan harapan dan juga program usaha akan mengalami keterhambatan.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, maka tidak berlebihan jika penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah Desa menegaskan peraturan yang berada dibawah naungan Desa yaitu seperti BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu.
2. Diharapkan pengelola BUMDes membuat usaha yang dapat membantu masyarakat dalam suatu pemberdayaan yang dapat membantu dalam segi perekonomian
3. Diharapkan pemerintah Desa mampu membangun kerjasama dengan pemerintah daerah agar bisa menambah modal usaha BUMDes agar supaya BUMDes bisa menambah program usaha yang lebih besar dan bisa membantu pemerintah desa dalam peningkatan ekonomi desa.
4. Diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi untuk membantu pemerintah ataupun BUMDes dalam upaya peningkatan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan serta pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani Sari, "Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai" Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Aprilia Theresia, Krishna, Andini, Ed AII, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung; Alfaberta, 2015
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi, Cet, 12: Jakarta, 2002.
- Blog Bumdes.id. Di akses pada tanggal 19 Oktober 2021.
- Blonkod Harun, S.Pd, Herlina Rasjid, SE.,MM "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Pengelolaan BUMDES Di desa Gentuma kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.
- Dr. Zubaei, M.ag.,M.Pd, *Pengembangan Masyarakat dan Praktik* PT Fajar Interpratama, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2013
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika system Pembangunan PKDSP, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes* (Jakarta Pimpinan Pusat Relawan Desa Nusantara PP RPDN), 2017.
- Dadang Julaintara *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta; Laporan Pustaka Utama 1999..
- Esi Intan Sari, "Peran badan Usaha Milik Desa BUMDES Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di kecamatan Panti Kabupaten Jember" Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Jember, 2019.
- Sadjojo Eko Putro, *Prioritas Penggunaan Dana*, Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015.
- Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996.
<https://lifepal.co.id/media/bumdes>., Di akses pada tanggal 8 Oktober 2021
- http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/UU_2014_6.pdf, di akses pada 7 juli 2021
- [https://mimbarrakyatnews.com/Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat](https://mimbarrakyatnews.com/Pentingnya_Pemberdayaan_Masyarakat), diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.
- Hasan Muhammad Tholchah dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis & Praktis* (Surabaya: Visipress Media, 2009).
- Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.
- Julaintara Dadang, *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta; Laporan Pustaka Utama 1999.

- Karjuni Dt. Maani , *Teori Actors Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Demokrasi. Vol. X, No 1, 2011.
- Makmun 2012, *Gambaran Kemiskinan dan Action Plann Penangannya* PT Raka Grafika persada, Jakarta
- Mutiara, “Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengurangi Kemiskinan Didesa Kalukubula Kecamatan Sigi kabupaten Donggala” Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam , IAIN datokarama, Palu, 2017.
- M. Setiadi Elly dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Prenada media Group, 2015.
- Margono, *Metode Penelitian* Cet. 2 Jakarta : Rineka Cipta, 2003. Muhammad Tholchah Hasan dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif Teoritis & Praktis*” (Cet.3, Surabaya: Visipres Media,2009)
- Puguh Budiono “*Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa BUMDES*” Bojonegoro, Jurnal Politik Muda 2015
- Sukasmanto , “*Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDES*” Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaruan Desa 2014 VII
- Sholihati Nikmah, “*Peran dan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar*” Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bandah Aceh, 2020 M/ 1442 M.
- Sri Kusuma Dewi Amelia, *Peranan Badan Usaha Milik Desa BUMdes Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Vol V No. 1 Februari 2014.
- Yusuf Agunggunanto Edy dkk, *pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes)*, vol 13 no 1 2016
- Septian Wijarnoko Agung “*Peran Badan Usaha Milik Desa BUMDES Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Padankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto*” Skripsi 2012
- Sadjojo Putro Eko, *Prioritas Penggunaan Dana*, Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015.
- Suparlan Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.
- Undang-undang Desa 2014 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , Fokus Media, Bandung, 2014.

Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembnguna dan Pemebrdayaan Masyarakat*, Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007.

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	Mashuri L Lakara	Kepala Desa	
2	Wida.S.Sos	Sekretaris Desa	
3	Sunardi	Direktur/Ketua BUMDes	
4	Ilham	Sekretaris BUMDes	
5	Devi	Bendahara BUMDes	
6	Supriadi	Ketua Kordinator Unit Usaha BUMDes	
7	Yulita	Masyarakat	
8	Dilan Mukramin	Masyarakat	
9	Alilun	Masyarakat	
10	Silfani	Masyarakat	

LAMPIRAN

Lampiran Foto



Foto Observasi Sekretariat BUMDes di Kantor Desa Lampo



Foto Observasi Usaha penyewaan kendaraan BUMDes Desa Lampo



Foto Observasi Usaha Jasa Sewa Tenda BUMDes Desa Lampo



Foto Pengambilan Data di Kantor Desa Lampo



Foto wawancara bersama Bapak Mashuri L Lakara selaku Kepala Desa Lampo



Foto wawancara bersama Bapak Sunardin Selaku ketua/Direktur BUMDes Desa Lampo



Foto wawancara bersama Ibu Devi selaku bendahara BUMDes Desa Lampo



Foto wawancara bersama Bapak Supriadi selaku Ketua kordinator unit usaha BUMDes Desa Lampo



Foto wawancara bersama bapak Ilham selaku Sekertaris BUMDes Desa Lampo



Foto bersama Ibu Lita Masyarakat Desa Lampo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PENULIS

1. Nama Lengkap : Akmal
2. NIM : 17.4.1.40009
3. Tempat/Tanggal Lahir : Lampo, 05 Juli 1994
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Muifrahman 2
6. Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
7. Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
8. Angkatan : 2017

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - Nama : Anwar
 - Agama : Islam
 - Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan
 - Alamat : Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah
Kabupaten Donggala
2. Ibu
 - Nama : Darmiati
 - Agama : Islam
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah
Kabupaten Donggala

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Lulusan SD Negeri Lampo Tahun 2006
2. Lulusan SMP Negeri 8 Lumbudolo tahun 2010
3. Lulusan SMA Negeri 1 Banawa Tengah Tahun 2013